



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan  
2024



# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu media pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah kepada publik/masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai media pertanggungjawaban berisi informasi capaian atas kinerja instansi pemerintah berupa laporan rutin tahunan, yang berfungsi sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait, alat perbaikan manajemen pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah, media pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif dan sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Rencana Strategis Kabupaten Magetan Tahun 2021-2026.

Manfaat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance) secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya, memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan berpedoman pada hal-hal tersebut diatas Dinkominfo Kota Pekalongan sebagai bagian dari Pemerintah Kota Pekalongan telah berupaya menyampaikan laporan atas kinerja yang dilaksanakan dalam Tahun 2024 dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinkominfo Kota Pekalongan Tahun

---

2024. Bentuk laporan ini telah disusun berdasarkan data-data yang ada di Dinkominfo Kota Pekalongan. Untuk kesempurnaan laporan ini kami selalu membuka diri terhadap saran, masukan dari semua pihak agar Dinkominfo Kota Pekalongan. dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lebih baik dalam mengemban amanah visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 15 Februari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



**Arif Karyadi, S.Sos**

Pembina Tingkat I

NIP. 19711017 199903 1 007

---

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2024. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan pada tahun 2024 memiliki 6 (enam) sasaran strategis dengan total 36 (enam) indikator kinerja, dan 6 (enam) target kinerja yang harus dicapai. Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan pada tahun 2024 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2024.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 5 (lima) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

1. Indikator Nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 87.60  
Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2024 nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan sebesar 83,40 dengan predikat A. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 95,21%.
  2. Indikator Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik target yang ditetapkan Sangat Baik (skor 88,31-100)  
berdasarkan penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tahun penilaian 2024, Nilai KIP Kota Pekalongan sebesar 96,06 dengan predikat INFORMATIF sehingga capaian untuk indikator Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik Kota Pekalongan sebesar 100%.
  3. Indikator Indeks domain tatakelola SPBE target ditetapkan 3.30  
Berdasarkan Penilaian Indeks SPBE yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB
-

capaian indeks domain tatakelola SPBE Kota Pekalongan Sebesar 3,30. Sehingga capaian untuk Indikator Indeks domain tatakelola SPBE sebesar 100%

4. Indikator Persentase ketersediaan data statistik sektoral target ditetapkan 98,50.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo diperoleh hasil 94,84%, sehingga capaian Indikator Persentase ketersediaan data statistik sektoral sebesar 96,28%.

5. Indikator Indeks tata kelola KAMI target ditetapkan II tingkat

Berdasarkan penilaian indeks tata kelola KAMI diperoleh hasil III+ dengan demikian capaian untuk indikator indeks tata kelola KAMI sebesar 200%.

Kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp 13.734.612.392-. atau 96,77 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 14.193.704.000 Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

---

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I      PENDAHULUAN

1.1    LATAR BELAKANG

1.2    GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3    KONDISI APARATUR

1.4    ISU STRATEGIS

BAB II     PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1    RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

2.2    INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026

2.3    PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA

3.1    PENGUKURAN KINERJA

3.2    EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.3    AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.4    PRESTASI YANG DIRAIH

BAB IV    PENUTUP

LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2021 - 2026

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Seiring dengan bergesernya peran negara dan pemerintah dari peranannya sebagai pemerintah (*government*) menjadi pemerintahan (*governance*), transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip-prinsip yang utama untuk dapat dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan paradigma peran pemerintahan (*governance*) yang senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik serta melibatkan masyarakat dalam seluruh kegiatan pembangunannya.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas mengandung makna bahwa segala bentuk dan hasil akhir pembangunan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku stakeholder utama, pengguna layanan, dan pemegang kedaulatan tertinggi negara. Bentuk pertanggungjawaban Perangkat Daerah tersebut disusun dalam suatu sistem yang terintegrasi, yang disebut sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP berkomitmen bahwa sejak tahap penyusunan Perjanjian Kinerja hingga tahap penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada akhir tahun anggaran, senantiasa ter-publish kepada masyarakat. Masyarakat dalam hal ini dilibatkan secara penuh untuk dapat melakukan pengawasan terhadap ketercapaian target masing-masing Perangkat Daerah dalam periode anggaran tertentu.

LKJIP sendiri disusun dengan tujuan menyajikan informasi kinerja yang terukur kepada Walikota, selaku pemberi mandat dan kepada masyarakat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. LKJIP juga sekaligus digunakan sebagai alat evaluasi untuk melakukan upaya-upaya perbaikan bagi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerjanya pada masa-masa mendatang.

Berkaitan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2024 berikut akan disajikan secara lengkap LKJIP Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024. Selain sebagai pemenuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, LKJIP ini juga disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25

---

tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

## **1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Dinas Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO) merupakan suatu Perangkat Daerah bentukan baru Dinas Tipe B, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

Tugas, pokok dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berdasarkan PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 71 TAHUN 2021, TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
5. Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik
6. Bidang Infrastruktur dan Statistik
7. Seksi Statistik
8. Bidang Aplikasi dan Persandian
9. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
10. UPTD
11. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan beserta seksi-seksinya adalah sebagai berikut :

### **A. Tugas**

---

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Pekalongan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang Komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan kebijakan Walikota.

Pelaksanaan kewenangan tersebut berdasarkan Peraturan Walikota No. 71 tahun 2016 tentang TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

## **B. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang komunikasi dan informatika;
  2. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika;
  3. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang informasi dan komunikasi publik;
  4. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang infrastruktur dan statistik;
  5. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang aplikasi dan persandian;
  6. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
  7. penyelenggaraan Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi/ Government Chief Information Officer (GCIO) Daerah;
  8. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
  9. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas
-

dan fungsinya.

### **C. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan**

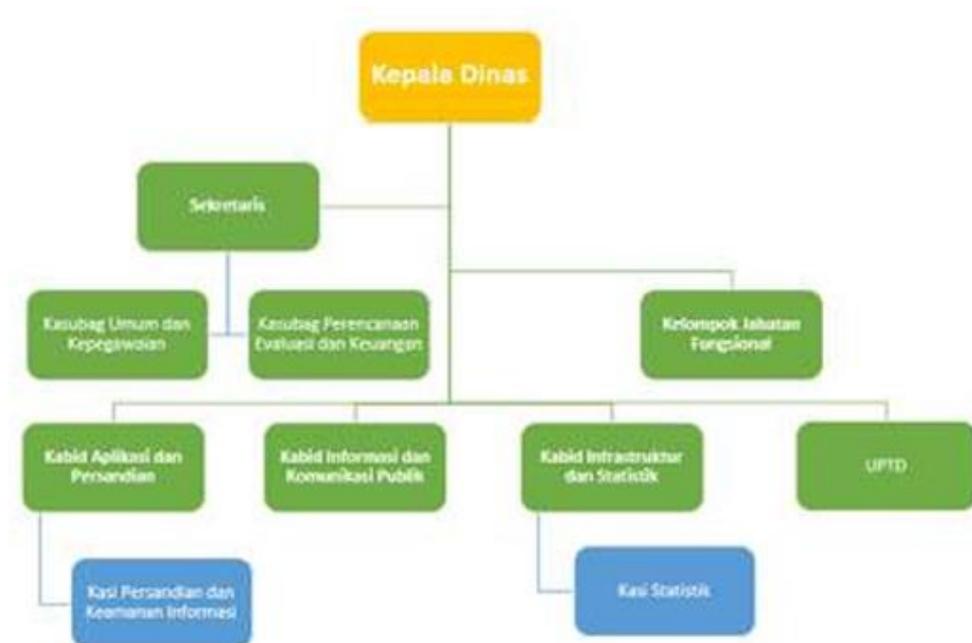
Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah No. 68 tahun 2016, tanggal 1 Desember 2016 Tentang Kedudukan dan susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas dan diperbarui dengan Peraturan Walikota Nomor 71 tahun 2021 tentang TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat;
  3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
  4. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  5. Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik;
  6. Bidang Infrastruktur dan Statistik;
  7. Seksi Statistik;
  8. Bidang Aplikasi dan Persandian;
  9. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
  10. Kelompok Jabatan Fungsional;
-

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 71 TAHUN 2021,  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN



### 1.3 KONDISI APARATUR

Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan kesemuanya berjumlah 117 orang. Bila diklasifikasikan atas dasar kelompok fungsi pada bidang dan sub bidang dimaksudkan akan sangat mendukung kelancaran pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan. Komposisi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berdasarkan fungsi, status kepegawaian dan Golongan/Ruang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

---

Tabel 1.1 Komposisi SDM Dinas Kominfo Berdasarkan Status Kepegawaian

<b>Status</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
<b>PNS</b>	<b>30</b>	<b>25.64 %</b>
Jabatan Struktural	9	7.69 %
Jabatan Fungsional Pranata Komputer Muda	4	3.41 %
Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Muda	2	1.70 %
JF Statistisi Pertama	1	0.85 %
JF Sandiman Pertama	1	0.85 %
JF Pranata Humas Pertama	1	0.85 %
JF Pranata Komputer Terampil	2	1.70 %
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	3	2.56 %
Jabatan Fungsional Umum	7	5.98 %
<b>PPPK</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Non PNS</b>	<b>87</b>	<b>74.35 %</b>
- Tenaga Kontrak	1	0.85 %
- Tenaga Kegiatan Dinas Kominfo	35	29.91 %
- Tenaga Kegiatan LPPL Radio Kota Batik	14	11.96 %
- Tenaga Kegiatan LPPL Batik TV	37	29.05 %
<b>Jumlah</b>	<b>117</b>	<b>100%</b>

---



	SMA	1		1		3.4%		3.3%	
	D3	3		3		10.3%		10%	
	DIV								
	S1	22		23		75.8%		76.6%	
	S2	2		2		6.8%		6.6%	
	S3	1		1		3.4%		3.3%	

Tabel 1.4 Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah		Presentase	
		2023	2024	2023	2024
	<b>Struktural</b>				
	II.A				
	II.B	1	1	3.4%	3.3%
	III.A	1	1	3.4%	3.3%
	III.B	3	3	10.3%	10%
	IV.A	4	4	13.7%	13.3%
	IV.B				
	<b>JUMLAH A</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>31%</b>	<b>30%</b>
	Jabatan Fungsional				
	JF Penyederhanaan Birokrasi	5	6	17.2%	20%
	JF Statistisi Pertama	1	1	3.4%	3.3%
	JF Sandiman Pertama	1	1	3.4%	3.3%
	JF Pranata Humas Pertama	1	1	3.4%	3.3%
	JF Pranata Komputer	2	2	6.8%	6.6%

	Terampil				
	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	3	3	10.3%	10%
	Jabatan Fungsional Umum	7	7	24.1%	23.3%
	<b>Jumlah B</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>68.9%</b>	<b>70%</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

#### 1.4 ISU STRATEGIS

Untuk mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi, diperlukan adanya analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi, situasi dan kondisi. Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dalam merumuskan lingkungan strategis, Dinkominfo Kota Pekalongan menggunakan metode atau teknik analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman:

##### 1. Kekuatan ( Strengths )

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kinerja Dinkominfo dalam mencapai visi dan misi, adalah :

- a. Adanya perubahan bentuk organisasi dari Kantor menjadi Dinas Tipe B.
  - b. Budaya inovasi terhadap ragam layanan publik yang cukup kuat.
  - c. Kenaikan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan Modal operasional, seperti: peralatan dan operasional monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPBE Kota Pekalongan, Infrastruktur SPBE.
  - d. Peningkatan Kualitas Publikasi dengan memanfaatkan media dan LPPL Batik TV dan Radio Kota Batik.
-

## 2. Kelemahan ( *Weakness* )

Beberapa Kelemahan internal yang menghambat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas Dinkominfo dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan analisis adalah :

- a. Terbatasnya anggaran pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Informatika.
- b. Terbatasnya anggaran pemeliharaan peralatan siaran pada Batik TV dan radio kota batik.
- c. Masih adanya keterbatasan anggaran diklat untuk mendapatkan upgrade ilmu dari lembaga yang berwenang dalam bidang Komunikasi dan Informatika.

## 3. Peluang ( *Opportunities* )

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai visi dan misinya, antara lain :

- a. Berkembangnya teknologi dari sisi infrastruktur dan aplikasi sehingga semakin banyak membuka peluang kebutuhan dalam pelayanan kepada masyarakat.
- b. Adanya peluang dukungan dan kerjasama penerapan SPBE dari lembaga / organisasi lain.
- c. Adanya komitmen dari pemangku kepentingan untuk mewujudkan transparansi pengelolaan informasi publik di Kota Pekalongan.

## 4. Ancaman ( *Threats* )

Ancaman terhadap berlangsungnya kegiatan Dinkominfo dapat diperoleh dari beberapa hal antara lain :

- a. Masih adanya respon dari beberapa OPD dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika.
  - b. Kurangnya monitoring dari sisi keamanan sistem dan infrastruktur dalam pengelolaan SPBE Tingkat Kota Pekalongan
  - c. Kurangnya manajemen dalam mengelola aset TIK.
-

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

---

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ *deployment*/cascading dari program serta tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2024

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2024
<b>VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius</b>		
<b>Misi Ke-7: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good</b>		

<b>Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target 2024</b>
<b>governance dan clean government</b>		
<b>Tujuan Kota : meningkatkan tata kelola yang efektif dan efisien</b>		
<b>Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika : meningkatkan kualitas layanan publik</b>	<b>indeks kepuasan masyarakat</b>	<b>86,62 %</b>
<b>Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika : meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>	<b>nilai SAKIP OPD</b>	<b>97,60</b>
<b>Program Dinas Komunikasi dan Informatika : program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja</b>	<b>100%</b>
Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100%
<b>Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika : meningkatkan keterbukaan informasi publik</b>	<b>nilai keterbukaan informasi publik (KIP) tingkat kota</b>	<b>97,00 Skor</b>
<b>Sasaran Meningkatnya layanan informasi publik</b>	<b>Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik</b>	<b>Sangat Baik (88,31 - 100)</b>
<b>Program Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	<b>Persentase penyelesaian permohonan informasi publik</b>	<b>100%</b>
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Daerah	87,00%
<b>Tujuan mengoptimalkan</b>	<b>indeks SPBE</b>	<b>3,32 Indeks</b>

<b>Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target 2024</b>
<b>implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (smart governance)</b>		
<b>Sasaran Meningkatnya tata kelola SPBE</b>	<b>Indeks domain tata kelola SPBE</b>	<b>3,05</b>
<b>Program Aplikasi Informatika</b>	<b>Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>3,10%</b>
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (IKK Output)	9,35%
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kerja yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo (IKK Output)	62,42%
<b>Tujuan meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral</b>	<b>laju pemanfaatan data statistik sektoral</b>	<b>50%</b>
<b>Sasaran Tersedianya data statistik sektoral</b>	<b>Persentase ketersediaan data statistik sektoral</b>	<b>73,00%</b>
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2%
<b>Tujuan mewujudkan keamanan informasi daerah</b>	<b>indeks keamanan informasi (KAMI)</b>	<b>III tingkat</b>
<b>Sasaran Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik</b>	<b>Indeks tata kelola KAMI</b>	<b>II tingkat</b>
<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan</b>	<b>2,80 persen</b>
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem Elektronik yang telah	9,35%

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2024
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	diamankan dengan sertifikat elektronik	
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelancaran pengiriman dan penerimaan naskah dinas melalui jaring komunikasi sandi	100%

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Target Sasaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	nilai SAKIP OPD	indeks	penghitungan nilai SAKIP tahun N yang dilakukan oleh inspektorat daerah kota Pekalongan	inspektorat daerah
2	meningkatnya layanan informasi publik	kinerja unit pelayanan informasi publik	mutu pelayanan	dihitung berdasarkan permenpan RB No. 14 tahun 2017	dinkominfo
3	meningkatnya tata kelola SPBE	indeks domain tata kelola SPBE	indeks	Indeks SPBE tahun N	dinkominfo

4	tersedianya data statistik sektoral	presentase ketersediaan data statistik sektoral	persen	jumlah data statistik sektoral yang diinput OPD dalam aplikasi PUSAKA / jumlah data yang ditargetkan x 100%	dinkominfo
5	terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	indeks tata kelola KAMI	tingkat	penilaian mandiri menggunakan tools indeks KAMI (komponen pendukung indeks KAMI)	dinkominfo

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Target Sasaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	nilai SAKIP OPD	Persen	85,00	86,00	87,00	87,70	87,70	87,80
2	meningkatnya layanan informasi publik	kinerja unit pelayanan informasi publik	mutu pelayanan	Baik (nilai 76,61 - 88,30)	Baik (nilai 76,61 - 88,30)	Baik (nilai 76,61 - 88,30)	sangat baik (nilai 88,31 -100)	sangat baik (nilai 88,31 -100)	sangat baik (nilai 88,31 -100)
3	meningkatnya tata kelola SPBE	indeks domain tata kelola SPBE	indeks	2,75	2,85	2,95	3,32	3,34	3,34
4	tersedianya data statistik sektoral	presentase ketersediaan data statistik sektoral	persen	66	68	70	98,50	98,50	98,50

5	terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	indeks tata kelola KAMI	tingkat	I	I	I	II	II	II
---	--	-------------------------	---------	---	---	---	----	----	----

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Kominfo  
Kota Pekalongan Tahun 2024

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan :			
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.62 Indeks
2	Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	97.00 Skor

3	Mengoptimalkan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Indeks SPBE	3.32 Indeks
4	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral	Laju pemanfaatan data statistik sektoral	50 Persen
5	Mewujudkan keamanan informasi daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	III tingkat
<b>Sasaran :</b>			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	87.60 Indeks
2	Meningkatnya layanan informasi publik	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu Pelayanan Sangat Baik (skor 88,31 - 100)
3	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	3.30 Indeks
4	Tersedianya data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	98.50 Persen
5	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks tata kelola KAMI	II tingkat

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Rp5.569.665.000,00	APBD

---

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp5.502.210.000,00	APBD
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp2.853.649.000,00	APBD
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp115.500.000,00	APBD
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp152.680.000,00	APBD

---

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

#### **3.1 PENGUKURAN KINERJA**

***Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :***

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya  
Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.
-

- **Arahan Operasional**  
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.
- **Akuntabilitas**  
Membantu untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
- **Perencanaan**  
Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
- **Pengelolaan**  
Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.
- **Penganggaran**  
Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.
- **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**  
Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.
- **Pengawasan Kerja**  
Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN

---

Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

#### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{rencana} - (\text{rencana} - \text{realisasi})}{\text{kinerja rencana}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

---

$$\text{Efisiensi} = \left( \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100\%$$

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

### 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

#### 3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2  
Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota  
Pekalongan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	87.60	83.40	95.21	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya layanan informasi publik	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu pelayanan	Sangat Baik (88,31 - 100)	Sangat Baik (88,31 - 100)	100	sangat berhasil
3	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	3.30	3.30	100	sangat berhasil
4	Tersedianya data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektora	Persen	98.50	94,84	96,28	sangat berhasil
5	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks tata kelola KAMI	Tingkat	II	III+	200	sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui :

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 3 (tiga) target;
  - 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 2 (dua) target;
  - 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 (nol) target.
-

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 118,29% dengan kategori Sangat Berhasil

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	86.16	87.00	87.60	83.40	▲
2	Meningkatnya layanan informasi publik	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu pelayanan		Sangat Baik (88,31 - 100)	Sangat Baik (88,31 - 100)	Sangat Baik (88,31 - 100)	●
3	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	2.10	2.40	3.20	3.30	▲
4	Tersedianya data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Persen	97.12	98.91	98.22	94,84	▼
5	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks tata kelola KAMI	Tingkat	I	I	II	III+	▲

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun  
2024 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2024	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	83.40	87.80	94,98	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya layanan informasi publik	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu pelayanan	Sangat Baik (Nilai 88,31-100)	Sangat Baik (Nilai 88,31-100)	100	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	3.30	3.34	98,80	Sangat Berhasil
4	Tersedianya data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Persen	94,84	98.50	96,28	Sangat Berhasil
5	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks tata kelola KAMI	Tingkat	III+	II	200	Sangat Berhasil

### 3.2.2. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	86.62	89.62	103.46	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Skor	97.00	96.03	99.00	Sangat Berhasil
3	Mengoptimalkan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Indeks SPBE	indeks	3.32	3.76	113.25	Sangat Berhasil
4	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral	Laju pemanfaatan data statistik sektoral	Persen	50.00	119.25	238.50	Sangat Berhasil
5	Mewujudkan keamanan informasi daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Tingkat	III	V	180	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 4 (empat) target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 1 (satu) target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak (nol) target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 146,84 % dengan kategori Sangat Berhasil

---

### 3.2.3. Analisis Capaian Kinerja

#### SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6  
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	85.00	indeks	87.60	83.40	87.60	83.40	95,21%	87.80

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2024. Hasil evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika memperoleh nilai 84,40 atau predikat "A". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Komunikasi dan Informatika sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika  
Tahun 2024

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15	23,60
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	21,00
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	83,40
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>A</b>	

Tabel 3.8.

Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2024
1	BAPPEDA	88,50
2	DINKOMINFO	83,40
3	DLH	85,45
4	DINDAKOP & UMKM	85,75
5	INSPEKTORAT	84,60
6	DPU-PR	81,25
7	BPKAD	84,50
8	DPMPPA	82,75
9	DKP	83,25
10	BKPSDM	83,20
11	DINDUKCAPIL	82,90
12	DINKES	83,20
13	SETDA	81,50
14	DINDIK	78,45
15	DINPARBUDPORA	77,55
16	DPMPTSP	77,90
17	DINAS PERHUBUNGAN	77,15
18	DINPERPA	76,10
19	KEC. PEKALONGAN SELATAN	77,00
20	DINARPUS	75,45
21	KEC. PEKALONGAN BARAT	76,15
22	KEC. PEKALONGAN UTARA	76,10
23	KEC. PEKALONGAN TIMUR	76,25
24	BPBD	75,45
25	DINPERINAKER	75,45
26	DINSOSP2KB	75,90

---

27	DINPERKIM	74,75
28	SATPOL-P3KP	74,25
29	SEKRETARIAT DPRD	75,15
30	KESBANGPOL	73,45

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
- b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
- c. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.9

Program dan Kegiatan yang mendukung indikator kinerja sasaran 1

Program	Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan (Refocusing) (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16.257.000	16.257.000	14.567.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 89,60%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 95,21%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,26%.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1 (satu) program sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya

100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian melalui proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah berjalan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.

**Sasaran 2 : Meningkatnya layanan informasi publik**

Capaian indikator sasaran Meningkatnya layanan informasi publik adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Kinerja Unit Pelayanan informasi publik	85.00	Mutu Pelayanan	Sangat Baik (skor 88,31 - 100)	100	Sangat Baik (skor 88,31 - 100)			

Indikator meningkatnya layanan informasi publik merupakan indikator kinerja mandiri kota pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional maupun provinsi.

Tabel 3.11

Perbandingan nilai KIP Kota Pekalongan dengan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Nilai	Kategori
----	----------------	-------	----------

---

1.	Kabupaten Sukoharjo	99,38	Informatif
2.	Kota Semarang	99,34	Informatif
3.	Kabupaten Wonosobo	97,61	Informatif
4.	Kota Salatiga	96,83	Informatif
5.	Kota Magelang	96,73	Informatif
6.	Kabupaten Banyumas	96,66	Informatif
7.	Kabupaten Kendal	96,32	Informatif
8.	Kabupaten Purbalingga	96,19	Informatif
9.	Kota Pekalongan	96,03	Informatif
10.	Kabupaten Temanggung	95,86	Informatif
11.	Kota Surakarta	95,59	Informatif
12.	Kabupaten Pati	95,35	Informatif
13.	Kabupaten Demak	95,20	Informatif
14.	Kabupaten Karanganyar	94,88	Informatif
15.	Kabupaten Klaten	84,88	Informatif
16.	Kota Tegal	94,73	Informatif
17.	Kabupaten Brebes	93,33	Informatif
18.	Kabupaten Blora	92,76	Informatif
19.	Kabupaten Cilacap	92,32	Informatif
20.	Kabupaten Rembang	92,05	Informatif
21.	Kabupaten Batang	92,04	Informatif
22.	Kabupaten Wonogiri	90,93	Informatif
23.	Kabupaten Magelang	90,78	Informatif
24.	Kabupaten Banjarnegara	89,56	Menuju Informatif
25.	Kabupaten Boyolali	89,53	Menuju Informatif
26.	Kabupaten Tegal	88,75	Menuju Informatif

---

27.	Kabupaten Kudus	88,18	Menuju Informatif
28.	Kabupaten Pemalang	85,17	Menuju Informatif
29.	Kabupaten Purworejo	84,66	Menuju Informatif
30.	Kabupaten Jepara	84,18	Menuju Informatif
31.	Kabupaten Kebumen	84,13	Menuju Informatif

faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Diselenggarakan nya rakor di tingkat kota utk seluruh unit pelayanan
2. Dilakukan desk asistensi kpd seluruh Unit pelayanan
3. Dilakukan monev penerapan KIP ke seluruh unit pelayanan
4. Diberikan penghargaan walikota kepada unit pelayanan terbaik

berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.12

Program dan Kegiatan yang mendukung indikator kinerja sasaran 2

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	5.432.210.000	5.502.210.000	5.454.522.509

dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penggunaan anggaran adalah sebesar 99,13%. apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,87%

pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1(satu) program sebagai berikut :

- 1) program informasi dan komunikasi publik. target untuk indikator ini adalah
-

persentase penyelesaian permohonan informasi publik sebesar 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan pelayanan permohonan informasi publik. program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- a) pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota. kegiatan ini diukur dengan indikator peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah dengan target 80% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 115%. indikator ini tercapai karena strategi komunikasi yang efektif, kualitas informasi yang baik, infrastruktur yang memadai, partisipasi aktif masyarakat, dan kebijakan yang mendukung.

### Sasaran 3 : Meningkatkan tata kelola SPBE

Capaian indikator sasaran Meningkatkan tata kelola SPBE adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.75	indeks		3.20	3.30	3.30	100	3.40

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Tabel 3.14

Hasil Evaluasi SPBE pemerintah daerah di Jawa Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4,42	Memuaskan
2.	Pemerintah Kab. Semarang	3,31	Baik
3.	Pemerintah Kab. Kendal	3,66	Sangat Baik
4.	Pemerintah Kab. Demak	3,93	Sangat Baik
5.	Pemerintah Kab. Grobogan	3,57	Sangat Baik
6.	Pemerintah Kab. Pekalongan	3,05	Baik
7.	Pemerintah Kab. Batang	3,55	Sangat Baik
8.	Pemerintah Kab. Tegal	3,16	Baik
9.	Pemerintah Kab. Brebes	2,84	Baik
10.	Pemerintah Kab. Pati	3,75	Sangat Baik
11.	Pemerintah Kab. Kudus	4,23	Memuaskan
12.	Pemerintah Kab. Pemasang	3,04	Baik
13.	Pemerintah Kab. Jepara	3,51	Sangat Baik

---

14.	Pemerintah Kab. Rembang	3,99	Sangat Baik
15.	Pemerintah Kab. Blora	3,28	Baik
16.	Pemerintah Kab. Banyumas	4,09	Sangat Baik
17.	Pemerintah Kab. Cilacap	3,27	Baik
18.	Pemerintah Kab. Purbalingga	3,93	Sangat Baik
19.	Pemerintah Kab. Banjarnegara	3,72	Sangat Baik
20.	Pemerintah Kab. Magelang	3,92	Sangat Baik
21.	Pemerintah Kab. Temanggung	3,64	Sangat Baik
22.	Pemerintah Kab. Wonosobo	3,79	Sangat Baik
23.	Pemerintah Kab. Purworejo	3,49	Baik
24.	Pemerintah Kab. Kebumen	4,07	Sangat Baik
25.	Pemerintah Kab. Klaten	4,07	Sangat Baik
26.	Pemerintah Kab. Boyolali	3,89	Sangat Baik
27.	Pemerintah Kab. Sragen	4,34	Memuaskan
28.	Pemerintah Kab. Sukoharjo	4,45	Memuaskan
29.	Pemerintah Kab. Karanganyar	3,90	Sangat Baik
30.	Pemerintah Kab. Wonogiri	4,20	Memuaskan
31.	Pemerintah Kota Semarang	3,95	Sangat Baik
32.	Pemerintah Kota Salatiga	3,64	Sangat Baik
33.	Pemerintah Kota Pekalongan	3,76	Sangat Baik
34.	Pemerintah Kota Tegal	3,95	Sangat Baik
35.	Pemerintah Kota Magelang	3,69	Sangat Baik
36.	Pemerintah Kota Surakarta	4,30	Memuaskan

faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. adanya komitmen yang kuat dari pimpinan terkait peningkatan tata kelola SPBE;
-

2. adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder yang menyelenggarakan SPBE di lingkungan Kota Pekalongan
3. adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi monitoring dan evaluasi SPBE;

berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.15

Program dan Kegiatan yang mendukung indikator kinerja sasaran 3

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan (Rp)	Pagu Anggaran perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota	1.685.845.000	1.710.845.000	1.693.130.553
	Pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	1.142.804.000	1.142.804.000	1.022.046.658

dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penggunaan anggaran adalah sebesar 95,15%. apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,09%.

pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1 (satu) program sebagai berikut :

- 1) program Aplikasi Informatika, target untuk indikator ini adalah 3.10 dan realisasi 3.25 sehingga capaiannya 104.84%. indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan indikator indeks aspek teknologi Informasi dan Komunikasi.

program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengelolaan Nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota. kegiatan ini diukur dengan indikator presentase unit kerja yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo dengan target 62,42% dan realisasi 61,82% sehingga capaiannya 99,04%. indikator ini tercapai karena merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk tahun ini tidak ada penambahan koneksi/sambungan ke jaringan batik.net dikarenakan adanya refocusing anggaran.
- b) Pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota. kegiatan ini diukur dengan indikator presentasi sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan target 9,35% dan realisasi 9,35% sehingga capaiannya 100%. indikator ini tercapai karena komitmen pimpinan, sosialisasi efektif, sumber daya memadai, proses pendaftaran mudah, koordinasi baik, pengawasan ketat, dan kepatuhan tinggi.

#### **sasaran 4 : Tersedianya data statistik sektoral**

Capaian indikator sasaran tersedianya data statistik sektoral adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16

#### **Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4**

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	presentase ketersediaan data statistik sektoral	66	persen	98,91	98,22	98.50	94,84	96,28	98,50

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2029 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa guna mendukung terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, efektif, efisien dan

transparan, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam Satu Data Terpadu Daerah (SDTD).

Dinas Kominfo selaku Wali Data Satu Data Terpadu Daerah mempunyai tugas untuk mengelola dan menyediakan data statistik sektoral yang disajikan dalam Portal Satu Data Terpadu Daerah. Persentase ketersediaan data statistik sektoral menjadi indikator capaian kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral urusan statistik pada Dinas Kominfo.

Indikator persentase ketersediaan data statistik sektoral merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.

Tabel 3.17

Presentase Keterisian Data SDTD tahun 2024

No.	OPD	Jumlah Tabel	Jumlah Tabel Terisi	Persentase
1	Setwan	17	17	100%
2	Inspektorat	14	14	100%
3	BPKAD	40	33	83%
4	BKPSDM	30	30	100%
5	Bapperida	32	32	100%
6	Dindik	80	70	88%
7	Dinkes	108	106	98%
8	DPUPR	70	70	100%
9	Dinperkim	27	27	100%
10	Satpol P3KP	22	22	100%
11	Kesbangpol	28	27	96%
12	BPBD	32	32	100%
13	Dinsos P2KB	65	64	98%

---

14	Dinperinaker	63	62	98%
15	DPMPPA	41	31	76%
16	Dinperpa	50	50	100%
17	DLH	78	78	100%
18	Dindukcapil	30	30	100%
19	Dinhub	22	22	100%
20	Dinkominfo	42	42	100%
21	Dindagkop	52	51	98%
22	DPMPTSP	27	27	100%
23	Dinparbudpora	64	59	92%
24	Dinarpus	51	51	100%
25	DKP	35	35	100%
26	RSUD	15	15	100%
27	Bag. Hukum	5	5	100%
28	Bag. Pemerintahan	9	9	100%
29	Bag. Organisasi	14	13	93%
30	Bag. Kesra	7	7	100%
31	Bag. Perekonomian & SDA	6	6	100%
32	Bag. Umum	6	6	100%
33	Bag. PBJ & Minbang	6	6	100%
34	Bag. Prokompim	2	2	100%
35	Kec. Barat	21	21	100%
36	Kec. Timur	21	21	100%
37	Kec. Utara	21	21	100%
38	Kec. Selatan	21	21	100%
39	BPN	4	4	100%

---

40	BPS	39	10	26%
	Total	1317	1249	94.84%

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan terkait kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral
2. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara Pembina data sektoral (BPS), Walidata (Dinkominfo), Produsen data (OPD) dan Koordinator Forum Data (Bappeda) dalam penyediaan data statistik sektoral.
3. Adanya peran aktif tim pengelola data sektoral (petugas pengelola data OPD) dalam menyediakan data sektoralnya masing-masing.

berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.18

Program dan Kegiatan yang mendukung indikator kinerja sasaran 4

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan (Rp)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	115.500.000	115.500.000	114.084.135

dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penggunaan anggaran adalah sebesar 98,77%. apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 96,28%, maka dapat dikatakan tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya.

pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1 (satu) program sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100% indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Komunikasi dan

Informatika dalam meningkatkan persentase perangkat daerah yang menyediakan data statistik sektoral. program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. kegiatan ini diukur dengan indikator jumlah dokumen statistik sektoral yang disusun dengan target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, sumber daya yang cukup, dan kepatuhan terhadap regulasi.

**sasaran 5 : Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik**

Capaian indikator sasaran Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks tata kelola KAMI	I	tingkat	I	II	II	III+	200	II

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001.

Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi.

Standar SNI ISO/IEC 27001 mendapatkan pembaruan yaitu SNI ISO/IEC 27001:2022 yang dirilis pada tahun 2022. Sebagai Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), SNI ISO/IEC 27001 sangat dinamis mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini diperlukan supaya standar keamanan informasi tetap relevan

dengan kondisi terkini.

Indeks KAMI merupakan suatu aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah.

berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.20

Program dan Kegiatan yang mendukung indikator kinerja sasaran 4

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan (Rp)	Pagu Anggaran perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	113.365.000	113.365.000	105.710.250
	Penetapan Pola Hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten/Kota	39.315.000	39.315.000	34.652.250

dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penggunaan anggaran adalah sebesar 91,93%. apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 300%, maka dapat dikatakan tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya.

pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1 (satu) program sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. target untuk indikator ini adalah 2,80% dan realisasi 2,80% sehingga capaiannya 100%. indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan persentase sistem elektronik yang dilakukan pengujian kerentanan. program ini diwujudkan dalam
-

pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. kegiatan ini diukur dengan indikator persentase sistem elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik dengan target 9,35% dan realisasi 9,35% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena komitmen pimpinan, alokasi anggaran memadai, sosialisasi efektif, implementasi standar keamanan, dan kerja sama yang baik.
- b. Penetapan Pola Hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten/Kota. kegiatan ini diukur dengan indikator persentase kelancaran pengiriman dan penerimaan naskah dinas melalui jaring komunikasi sandi dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena perencanaan matang, infrastruktur handal, protokol komunikasi jelas, SDM terlatih, dan pemeliharaan rutin.

### **3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2024 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 14.193.704.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 13.734.612.392,- atau sebesar 96,77%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp. 10.209.325.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.944.322.586,- atau sebesar 97,40%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

---

Tabel 3.21  
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp.)	%
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>Rp14.193.704.000,00</b>	<b>Rp13.734.612.392,00</b>	<b>96,77%</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Rp5.569.665.000,00</b>	<b>Rp5.310.466.037,00</b>	<b>95,35%</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp16.257.000,00</b>	<b>Rp14.567.000,00</b>	<b>89,60%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp2.494.000,00	Rp2.494.000,00	100,00%
2	Koordinasikan dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp1.763.000,00	Rp1.763.000,00	100,00%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp12.000.000,00	Rp10.310.000,00	85,92%
	<b>Administrasi Perangkat Keuangan Daerah</b>	<b>Rp3.933.003.000,00</b>	<b>Rp3.726.723.306,00</b>	<b>94,76%</b>
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.882.329.000,00	Rp3.676.055.306,00	94,69%
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp49.040.000,00	Rp49.038.000,00	100,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp1.634.000,00	Rp1.630.000,00	99,76%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp72.000.000,00</b>	<b>Rp66.770.467,00</b>	<b>92,74%</b>
7	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	100,00%
8	sosialisasi peraturan perundang- undangan	Rp67.000.000,00	Rp61.770.467,00	92,19%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp449.689.000,00</b>	<b>Rp445.786.764,00</b>	<b>99,13%</b>

9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp4.087.000,00	Rp4.080.000,00	99,83%
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp142.553.000,00	Rp139.403.720,00	97,79%
11	penyediaan peralatan rumah tangga	Rp10.373.000,00	Rp10.363.600,00	99,91%
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp111.176.000,00	Rp111.125.100,00	99,95%
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp40.000.000,00	Rp39.998.250,00	100,00%
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Rp16.800.000,00	Rp16.246.500,00	96,71%
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp124.700.000,00	Rp124.569.594,00	99,90%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp653.696.000,00</b>	<b>Rp615.247.125,00</b>	<b>94,12%</b>
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	100,00%
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp511.860.000,00	Rp476.466.763,00	93,09%
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp139.436.000,00	Rp136.380.362,00	97,81%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp445.020.000,00</b>	<b>Rp441.372.375,00</b>	<b>99,18%</b>
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp200.810.000,00	Rp198.586.022,00	98,89%
20	pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp75.000.000,00	Rp74.965.000,00	99,95%
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp169.210.000,00	Rp167.821.353,00	99,18%
	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Rp5.502.210.000,00</b>	<b>Rp5.454.522.509,00</b>	<b>99,13%</b>

	<b>pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota</b>	<b>Rp5.502.210.000,00</b>	<b>Rp5.454.522.509,00</b>	<b>99,13%</b>
22	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Rp40.000.000,00	Rp39.988.000,00	99,97%
23	monitoring opini dan aspirasi publik	Rp145.500.000,00	Rp145.250.000,00	99,83%
24	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Rp127.796.000,00	Rp121.527.647,00	95,10%
25	Pengelolaan media komunikasi publik	Rp3.106.544.000,00	Rp3.088.727.830,00	99,43%
26	pelayanan informasi publik	Rp208.189.000,00	Rp201.819.177,00	96,94%
27	layanan hubungan media	Rp1.317.510.000,00	Rp1.314.517.554,00	99,77%
28	kemitraan dengan pemangku kepentingan	Rp45.000.000,00	Rp44.985.000,00	99,97%
29	manajemen komunikasi krisis	Rp396.512.000,00	Rp385.022.301,00	97,10%
30	penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Rp115.159.000,00	Rp112.685.000,00	97,85%
	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Rp2.853.649.000,00</b>	<b>Rp2.715.177.211,00</b>	<b>95,15%</b>
	<b>pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota</b>	<b>Rp1.710.845.000,00</b>	<b>Rp1.693.130.553,00</b>	<b>98,96%</b>
31	penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah Kota	Rp5.250.000,00	Rp4.893.000,00	93,20%
32	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Rp1.705.595.000,00	Rp1.688.237.553,00	98,98%
	<b>Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota</b>	<b>Rp1.142.804.000,00</b>	<b>Rp1.022.046.658,00</b>	<b>89,43%</b>

33	Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	Rp250.020.000,00	Rp239.599.500,00	95,83%
34	pengelolaan pusat data pemerintahan daerah	Rp154.420.000,00	Rp153.048.910,00	99,11%
35	pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Rp381.600.000,00	Rp328.134.248,00	85,99%
36	pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas	Rp297.214.000,00	Rp245.499.500,00	82,60%
37	pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Rp32.066.000,00	Rp30.529.000,00	95,21%
38	monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Rp27.484.000,00	Rp25.235.500,00	91,82%
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Rp115.500.000,00</b>	<b>Rp114.084.135,00</b>	<b>98,77%</b>
	<b>Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota</b>	<b>Rp115.500.000,00</b>	<b>Rp114.084.135,00</b>	<b>98,77%</b>
39	koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Rp115.500.000,00	Rp114.084.135,00	98,77%
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Rp152.680.000,00</b>	<b>Rp140.362.500,00</b>	<b>91,93%</b>
	<b>penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota</b>	<b>Rp113.365.000,00</b>	<b>Rp105.710.250,00</b>	<b>93,25%</b>
40	penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp11.250.000,00	Rp11.214.500,00	99,68%

41	pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Rp72.870.000,00	Rp67.865.000,00	93,13%
42	penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp29.245.000,00	Rp26.630.750,00	91,06%
	<b>penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota</b>	<b>Rp39.315.000,00</b>	<b>Rp34.652.250,00</b>	<b>88,14%</b>
43	operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp39.315.000,00	Rp34.652.250,00	88,14%

### 3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

1. Penghargaan BATIK TV pada event Anugerah KPID yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Informasi Daerah Jawa tengah 2024, diantaranya yaitu :
  - a. Presenter pria terbaik 1 (Rafid Fajri)
  - b. Presenter pria terbaik 2 (Aziz Mahendra)
  - c. Presenter wanita terbaik 2 (farah Farhad)
  - d. LPP TV Lokal Terbaik 3
  - e. Program Feature terbaik 2 (Healing)
  - f. Program Talkshow terbaik 2(Expose)



2. Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah kepada Kota Pekalongan sebagai Badan Publik Informatif



3. Penghargaan berita teraktif di Layanan Informasi Publik oleh Antara Digital Media



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 1.1. Kesimpulan

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung serta melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2024 adalah baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa Dinkominfo Kota Pekalongan telah berupaya memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas utamanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinkominfo Kota Pekalongan Tahun 2024 mengalami peningkatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

#### 1.2 Peningkatan dan Perbaikan Kinerja

Untuk lebih meningkatkan kinerjanya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan ke depannya akan melakukan beberapa langkah, antara lain:

- a. Peningkatan kemampuan kerja dari SDM (ASN dan Non ASN) yang dimiliki.
  - b. Peningkatan dukungan keuangan dan sarana prasarana untuk mencapai layanan komunikasi dan informasi sesuai standardisasi.
  - c. Senantiasa memantau dan mengolah informasi yang diperoleh dari tren/kebutuhan masyarakat terkini dan dari hasil studi ke Perangkat Daerah sejenis.
-

- d. Melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan informatika dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang diperlukan.

### 1.3 Penutup

Demikian laporan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan sebagai realisasi rencana kerja tahun 2024.

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja dari semua unsur yang terkait dari pimpinan, para bidang, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf dan tenaga kegiatan lainnya yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target program yang tersusun.

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan secara optimal dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok secara keseluruhan telah sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diatas.

Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dimasa yang akan datang, juga diharapkan dapat berperan serta sebagai barometer dalam penilaian kualitas kinerja juga sebagai alat pendorong untuk terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*clean and government*), serta dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk penyusunan perencanaan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.

---

## LAMPIRAN

1. IKU PERUBAHAN 2021-2026
2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024



**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021-2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	85,00	85,00	86,00	87,00	87,60	87,70	87,80	Inspektorat Daerah	Dinkominfo
2	Meningkatnya layanan informasi publik	Kinerja unit pelayanan informasi publik	Mutu Pelayanan	Dihitung berdasarkan Permenpan RB No. 14 Tahun 2017	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	Baik (Nilai 76,61 - 88,30)	angat Baik (Nilai 88,31 - 100)	Sangat Baik (Nilai 88,31 - 100)	angat Baik (Nilai 88,31 - 100)	Dinkominfo	Dinkominfo			
3	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	Indeks SPBE Tahun N	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	2,75	2,75	2,85	2,95	3,32	3,34	3,34	Dinkominfo	Dinkominfo
4	Tersedianya data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Persen	Jumlah data statistik sektoral yang diinput OPD dalam aplikasi PUSAKA / jumlah data yang ditargetkan x 100%	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	66	66	68	70	98,50	98,50	98,50	Dinkominfo	Dinkominfo
5	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Tata Kelola KAMI	Tingkat	Penilaian mandiri menggunakan tools indeks KAMI (komponen pendukung indeks KAMI)	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	I	I	I	I	II	II	II	Dinkominfo	Dinkominfo

Pekalongan, 9 Desember 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Pekalongan



**Ani Karjadi, S.Sos**

NIP. 19711017 199903 1 007



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIF KARYADI S.Sos.**

Jabatan : **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pekalongan, 9 Desember 2024**

**Pihak Kedua,  
Wali Kota Pekalongan**



**H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., MM.**

**Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika**

  
**ARIF KARYADI S.Sos.**  
**NIP. 19711017 199903 1 007**



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIF KARYADI S.Sos.**

Jabatan : **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pekalongan, 9 Desember 2024**

**Pihak Kedua,  
Wali Kota Pekalongan**



**H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., MM.**

**Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika**

**ARIF KARYADI S.Sos.  
NIP. 19711017 199903 1 007**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

**Unit Kerja: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan**

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.62 Indeks	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2.	Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	97.00 Skor	Formulasi : Tahapan Penilaian (pemeringkatan) : - pemenuhan website konten PPID - SAQ (Self Assessment Quesioner) - Verifikasi - Uji publik Formulasi = Rata-rata nilai semua tahapan penilaian Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
3.	Mengoptimalkan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Indeks SPBE	3.32 Indeks	Formulasi : Indeks SPBE tahun N dihitung berdasarkan Permenpan RB No. 59 Tahun 2020 Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : KemenPAN RB
4.	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral	Laju pemanfaatan data statistik sektoral	50 Persen	Formulasi : (Jumlah pengunjung aplikasi pusaka tahun N - Jumlah pengunjung aplikasi pusaka tahun N - 1) / Jumlah pengunjung aplikasi pusaka tahun N - 1 Tipe Capaian: Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber Data : Dinkominfo

5.	Mewujudkan keamanan informasi daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	III tingkat	Formulasi : Penilaian mandiri menggunakan tools indeks KAMI Tipe Capaian: Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber Data : Dinkominfo
Sasaran :				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	87.60 Indeks	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya layanan informasi publik	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	5 Mutu Pelayanan	Formulasi : Dihitung berdasarkan Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinkominfo
3.	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	3.30 Indeks	Formulasi : Indeks domain tata kelola SPBE tahun N dihitung berdasarkan Permenpan RB No. 59 Tahun 2020 Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : KemenPAN RB
4.	Tersedianya data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	98.50 Persen	Formulasi : Jumlah data statistik sektoral yang diinput OPD dalam aplikasi PUSAKA / jumlah data yang ditargetkan x 100% Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinkominfo
5.	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks tata kelola KAMI	II tingkat	Formulasi : Penilaian mandiri menggunakan tools indeks KAMI (komponen pendukung indeks KAMI) Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinkominfo

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.569.665.000	APBD-P
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 5.502.210.000	APBD-P
3. Program Aplikasi Informatika	Rp. 2.853.649.000	APBD-P
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 115.500.000	APBD-P
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 152.680.000	APBD-P

Pekalongan, 9 Desember 2024

Wali Kota Pekalongan



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., MM.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

ARIF KARYADI S.Sos.  
NIP. 19711017 199903 1 007